

STUDI BEBERAPA KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Ekawati

Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Samarinda, Kalimantan Timur dengan metode perpustakaan. Tujuan dari itu bersedia untuk mengetahui donor korupsi oleh Anas Urbaningrum, mantan ketua partai Demokrat. Hal ini diambil pada tahun 2014 dari Kaltimpost. Hasilnya bahwa ada beberapa proyek di Indonesia rusak oleh Anas dan teman-temannya di antara adalah: proyek Hamblang Youth Centre, e-KTP, pesawat Merpati, bangunan pajak, East Kaltim listrik, pendidikan dan pelatihan dengan anggaran tryliun. Proyek-proyek melibatkan beberapa petugas. (1). Beberapa suara dari korupsi penerimaan ilegal uang dan materi, (2). Untuk memenangkan pengadilan adalah kesempatan kecil (3). suatu akuntabilitas dedikasi untuk negara, kelompok atau individu luar biasa (4). bersalah akan terbukti di pengadilan. (5). Jika terbukti benar itu adalah tindakan yang buruk dari Anas. Saran-saran (1). The komisi korupsi harus memecahkan benar-benar dengan mengambil bersalah dengan aktor, (2). Uang rusak harus diberikan kembali ke negara tersebut, (3). Lembaga kontrol harus bekerja keras, (4). Para aktor harus dikirim ke penjara dan dihukum sekeras mungkin. (5). Jika ada bukti ia harus direhabilitasi.

Kata Kunci: korupsi, ilegal, penjara, bersalah

ABSTRACT

This research is carried out in Samarinda, East Kalimantan by library method. The aim of it is willing to know the corruption donor by Anas Urbaningrum, the former of the chairman of Demokrat party. It is taken in the year 2014 from Kaltimpost. The results are that there are some projects in Indonesia corrupted by Anas and his friends among are: the Hamblang Youth Centre project, e-KTP, Merpati aircraft, tax building, East Kaltim electricity, education and training with tryliun budget. Those projects involve some officers. (1). Some sounds of corruption are the illegal receipt of money and materials, (2). To win the court is small opportunity (3). The accountability of the dedication for state, group or individual is unbelievable (4). The guilty will be proved in the court. (5). If it is proved rightly it is a bad action of Anas. The suggestions (1). The corruption commision has to solve totally by taking in guilty to the actors, (2). The money corrupted has to be given back to the country, (3). The control institution has to work hard, (4). The actors have to be sent to jail and sentenced as hard as possible. (5). If no proof he must be rehabilitated.

Keywords : *corruption, illegal, jail, guilty*

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kata korupsi telah menjadi kata yang terkenal di seluruh dunia termasuk di Indonesia terutama pada lima tahun terakhir yang menjadi istilah Tindak Pidana Korupsi atau TIPIKOR yang sekarang menjadi lembaga baru di peradilan yaitu Pengadilan Tipikor. Namun demikian masih banyak orang menganggap bahwa penangkapan atau pengungkapan kasus korupsi sering dituduhkan berbau politik padahal tidak yaitu murni kriminal. Kecurigaan berbau politik, bakal dikriminalisasi, diracun atau disiksa terus beredar padahal kalau secara hukum bahwa tanpa ada bukti cukup yaitu minimal 2 (dua) bukti kuat orang tidak akan dinyatakan tersangka. Orang yang tidak kooperatif pasti ditahan karena dikawatirkan memusnahkan barang bukti. Yang paling heboh pada saat ini sedang diproses dan menjadi tersangka adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ia sekarang ditahan di rumah tahanan KPK di Guntur sejak Jum'at tanggal 10 Januari 2014. Seperti dilansir di Kaltim Post. Ia dan kroninya seperti kebakaran jenggot, banyak persepsi negatif dan ngomeli petugas rumah tahanan KPK sepertinya grogi dan hilang kepercayaan diri. Perilaku mereka sebagai berikut:

1. Dua hari setelah sempat bersitegang dengan petugas, keluarga Anas Urbaningrum akhirnya bisa membesuk. Adik Anas, Anna Luthfie kembali membawa ransum yang selama ini ditolak KPK, yakni pakaian, buku dan Alqur'an, serta makanan. Dia menyebut selama ditahan Anas banyak menulis dan tirakat.
2. Luthfie menyatakan keadaan kakaknya baik-baik saja. Soal makanan yang selama ini disarankan agar tidak dikonsumsi, tampaknya dituruti Anas. Dia menyebut saat ditemui, Anas mengaku tidak makan makanan KPK.
3. Lantaran Anas bakalan menolak makanan KPK, kemarin dia membawa banyak pasokan. Terutama, makanan ringan serta roti tawar yang bisa dikonsumsi untuk sarapan. Untuk buku, Luthfie membawa bacaan berjudul Merdeka seratus Persen dan Heroes karya Tan Malaka. Untuk judul terakhir, disebutnya bukan permintaan Anas tetapi ini sifatnya untuk membakar semangat Anas di dalam penjara. Dia menyebut buku itu cocok untuk kakaknya yang sedang memperjuangkan kebenaran. Ia sengaja membawakan. Ini bukan bacaan wajib untuk para aktivis.
4. Soal kegiatan Anas selama ini, dia menyebut kakaknya banyak menulis dan mendekat diri pada Tuhan. Dia melihat Anas menulis tentang kuliner. Belum tentu pasti tulisan itu nanti menjadi buku atau hanya pelampiasan rasa sepi. Yang pasti, sementara ini belum ada tulisan soal politik.
5. Saat ditanya kapan Athiyyah Laila istri Anas menjenguk, dia menjawab kemungkinan datang pada hari ini. Memang, jam besuk pada Senin dan Kamis bisa bertambah. Biasanya, waktu tambahan itu diberikan saat ada hari libur nasional. Iparnya tidak bisa ikut menjenguk karena masih di rumah orang tuanya.
6. Tidak hanya keluarga, loyalis Anas, Tri Dianto, Saan Mustopa, Umar Arshal dan anggota Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) juga datang untuk menjenguk namun, keduanya tidak diizinkan untuk masuk karena saat ini hanya keluarga yang boleh bertemu Anas.
7. Sama seperti Luthfi, kedua orang tersebut juga membawa beberapa keperluan termasuk makanan. Namun, seperti itu harus dibawa kembali karena tidak diterima oleh petugas keamanan KPK. Lantaran tidak diizinkan masuk, Saan memilih untuk menitipkan salam pada Anas melalui keluarga yang datang. Rencananya, kalau datang lagi dia akan membawa makanan kesukaan Anas. Saan juga mengaku tidak bisa

mendampingi anas saat di tahan pada Jumaat (10/1) karna ada di luar kota. Sementara mantan ketua DPC Partai DEMOKRAT Cilacap, Tri Dianto bertekat untuk datang lagi rencananya, dia kembali ke KPK pada hari Kamis saat jam besuk dibuka lagi

8. Pada bagian lain entah sebagai *counter* terhadap penahanan Anas atau mempunyai maksud lain, puluhan pengunjukrasa berasal dari Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Anti korupsi kemarin mendatangi KPK mereka membawa kerangka kayu yang dibalut dengan kain menyerupai bentuk pil benda berukuran jumbo di beri nama “pil kuat” itu di serahkan ke KPK pil raksasa berwarna hijau dan hitam identik dengan warna bendera HMI itu bertuliskan “pil kuat” Antiintervensi islam untuk KPK. Tangkap Edhe Baskoro Yudhoyono Seseorang orator menyampaikan obat kuat itu diberikan agar KPK tegas termasuk pada lingkaran istana. Sebab selama ini sejumlah nama keluarga SBY disebut dalam kasus korupsi namun belum ada yang di periksa “KPK setelah mas Anas. Kami teriakan keadilan kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar dengan bukti yang kongkret.

Dengan latar-belakang ini peneliti ingin meneliti tentang kasus Anas Urbaningrum yang merupakan orang nomor satu di Partai demokrat.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengapa pengikut Anas tidak bisa menerima idolanya menjadi tersangka dan ditahan ?

C. Tujuan penelitian

Mengetahui penyebab pengikut Anas tidak bisa menerima idolanya menjadi tersangka dan ditahan.

D. Manfaat penelitian

1. Secara praktis

1. Peneliti mengusulkan kepada KPK agar lebih gencar lagi memberantas korupsi terutama di daerah.
2. Peneliti mengusulkan agar fungsi pengawasan di lembaga lain meniru langkah KPK agar lebih menggigit.

2. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini menjadi data awal bagi peneliti yang akan datang.
2. Mengembangkan ilmu tentang pemberantasan korupsi.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Korupsi hubungannya dengan Good governance

1. Etimologi

Kata korupsi dari Bahasa Inggris Corruption. Menurut Hornby (1996:192) corrupt as adjective is dishonest, immoral, through taking bribes and depraved. Corrupt as verb is to make corruption as noun is immoral action or dishonest action. Jadi intinya

bahwa kata corrupt sebagai kata sifat adalah berarti curang, menyuap dan tidak bermoral. Kata corrupt sebagai kata kerja adalah bertindak tidak jujur dan tidak bermoral. Kata bahwa Corruption adalah ketidakjujuran.

2. Ragam korupsi

Tindak koruptif tersebut dapat bermacam ragam yaitu korupsi uang, kewenangan, waktu, analisa, seks, pencucian uang dan gratifikasi. Korupsi uang telah terjadi misalnya markup atau penggelembungan yaitu menambah jumlah harga dari yang sebenarnya dibelanjakan atau mengurangi kualitas yang sebenarnya tetapi dibayar seperti standar yang sebenarnya. Korupsi kewenangan yang disalahgunakan yang ujung-ujungnya juga korupsi uang, misalnya jual beli ijin, jual beli fee, monopoli keluarga, kroni, alumni dan sejenisnya. Korupsi waktu adalah menggunakan waktu yang bukan haknya misalnya jam kantor tetapi ke pasar belanja atau kegiatan yang di luar tugasnya. Korupsi analisa yaitu membuat analisa yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan publik, hasil analisa dibuat seolah meyakinkan namun tidak terbuka sehingga ada yang disembunyikan dan disamarkan. Korupsi seks adalah upah dengan kenikmatan seks untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan baik jabatan, pekerjaan, fasilitas, proyek dan sejenisnya yang illegal. Korupsi dengan pencucian uang (money laundry) adalah hasil korupsi yang dialihkan dengan membelanjakan atau menukarkan atau mengirimkan ke pihak lain kemudian berbentuk wujud lain seperti kebun toko, pabrik dan lain-lainnya. Korupsi gratifikasi adalah pemberian kepada seseorang yang memiliki kewenangan, power atau jabatan atau kedudukan yang dapat memberi akses Cara mengatasinya adalah pembuktian terbalik pada harta kekayaannya.

B. Pengertian Virus

1. Etimologi

Kata virus berarti sesuatu yang sangat kecil bahkan lebih kecil dari bakteri yang beracun dan berbisa yang dapat mematikan (Hornby,1996:958). Virus ini dapat menyebar dan memusnahkan apa saja yang dilewati. Walaupun saat ini telah ada penangkalnya. Tindak pidana korupsi adalah sebuah virus yang susah dimusnahkan karena sudah membudaya sampai darah daging.

2. Virus dimana saja

Virus komputer sebagai contoh bila mengenai data maka data tersebut akan hancur. Demikian pula bila virus korupsi telah masuk di perilaku manusia maka apa saja akan dikorupsi baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Dengan kata lain korupsi menyikat apa saja. Pernah terjadi dana orang miskin diembat seperti beras miskin, BLSM, bea-siswa, dana partai. dana pemilu, pencetakan buku agama, dana bencana dan lain-lain.

C. Pengertian Penghidupan dan Kehidupan

1. Etimologi

Kata Penghidupan dan Kehidupan adalah kata benda. Penghidupan adalah mata-pencarian dan kehidupan adalah kelestarian makhluk untuk terus hidup. Dua hal itu dapat terganggu atau musnah karena tindak pidana korupsi. Oleh karena korupsi bisa terkait dengan pribadi, korporasi, jabatan, kewenangan dan kedudukan.

III. PEMBAHASAN

Kebijakan publik yang pro rakyat adalah yang berdasarkan asas pemerintah yang bersih dan berwibawa atau Good Governanace. Seorang tokoh sekelas Anas yang diduga korupsi melalui penerimaan uang dari pemborong yang barang buktinya akan dibuka di persidangan Februari medatang akan menjadi lebih jelas. Yang menonjol adalah menerima uang dari perusahaan untuk kemenangan merebut posisi Ketua Umum. Namun KPK berjejuduk lembaga 100% artinya apa yang disangkakan oleh KPK kepada siapa saja pasti terbukti hingga saat ini KPK masih diyakini kebenarannya.

Dalam perkembangan pemeriksaan KPK kemarin yang tentu terkait dengan Anas Urbaningrum, Nazaruddin dan staf perusahaannya juga kembali memeriksa tersangka Hambalang yang lain, Machfud Suroso. Direktur PT Dutasari Citralaras dari Proyek Hambalang itu mengaku siap melakukan pembuktian terbaik atas tuduhan korupsi yang di alamatkan kepadanya. Pencegahan Machfud Suroso, Syaipul Ahmad Dinar mengungkapkan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perolehan PT Dutasari Chitralas dari Proyek Hambalang. Syaipul mengatakan dalam proses hambalang sebenarnya kliennya malah rugi. Sebab biaya yang sudah dikeluarkan lebih besar dari yang di dapat dari hambalang. Akibatnya kliennya rugi hingga 40 (empat-puluh) miliar lebih. Hitung-hitungannya itu semua ada, makanya kami siap melakukan pembuktian terbalik dipersidangan. Uang inilah yang menjadi malapetaka Partai Demokrat dan melibatkan banyak orang dan instansi baik swasta maupun negeri. Namun proses yang menggelinding ini bisa terbukti atau tidak akan bergantung pada pembuktiannya. Bagi KPK siapapun yang diperiksa mengaku atau tidak adalah hak tersangka tetapi barang bukti dan saksi tetap ada sehingga bagi Anas akan rugi sendiri. Apabila dalam persidangan dugaan korupsi kepada Anas tak terbukti maka Anas bebas demi hukum. Namun sekali lagi KPK adalah lembaga super body yang berlebel 100% artinya tanpa bukti kuat lembaga ini tidak akan member status kepada seseorang tersangka. Senyatanya hal tersebut disebabkan banyak orang yang terlibat terkejut atas keseriusan pemerintah SBY memberantas korupsi yang tidak pandang bulu. Pejabat tinggi yang sok bersih berkoar anti korupsi atau akan perang korupsi tetapi nyatanya masih korupsi juga. Akibatnya para pejabat, petinggi partai sampai pengusaha dipidana karena kasus korupsi (Susilo Bambang Yudoyono,2011).

Upaya pemerintah sampai ke daerah yaitu satuan kerja reserse dan kriminal yang tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebagai contoh di 2014 ini Polres Kutai Timur kembali mendapat dukungan penuh dari Mabes polri untuk mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi dimana dalam penanganannya setiap kasus, Unit Tipikor Satreskrim diberikan anggaran sebesar Rp 208 juta.

Menurut Kapolres Kutim AKBP Edgar Diponogoro, mantan penyidik KPK, (Kaltimpost, 2014) bahwa kalau beliau lihat di Dipa Polri, penanganan satu kasus korupsi mendapat anggaran Rp 208 juta. Untuk tahun depan diberi batas maksimal anggaran untuk menangani 2 (dua) perkara korupsi. Saya belum bisa ungkapkan berapa yang akan naik penyidikan tahun ini. Tapi setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) kasus yang akan di garap sesuai Dipa anggaran yang di berikan Polri. Beberapa informasi sudah dihimpun. mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera digarap. Jadi akan kami coba menerapkan UU pencucian uang bagi tersangka korupsi, sebab dengan cara ini aset tersangka korupsi bisa disita untuk dikembalikan ke Negara.

Beliau mengakui untuk 2014 dirinya tidak memasang target pengungkapan kasus korupsi. Sebab dalam kasus korupsi tidak boleh menarget seseorang sebagai tersangka. Namun sebagai mana caranya bisa menemukan, apakah seseorang itu terlibat tindak pidana korupsi atau tidak. Jika memang ditemukan, maka akan langsung

diselidiki sampai tuntas. Begitu juga sebaliknya. Meskipun begitu, Kapolres mengakui, Dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi, pihaknya tidak hanya mengejar tersangka saja, namun bagai mana juga melakukan recovery (pengembalian) aset yang merugikan Negara. Itu sebabnya, polres juga akan coba menerapkan undang-undang tentang pencucian uang (money laundering) terhadap tersangka kasus dugaan korupsi.

Sementara itu, Kanit Tipikor Reserse Polres Kutim Ipda Slamet menerangkan, pada tahun 2013 ada 2 kasus yang telah di limpahkan ke Kejaksaan. Yakni, kasus dugaan korupsi dana bansos Majelis Taklim Danau Melintang, yang sudah dalam tahap P21(lengkap). Sementara, Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial aspirasi DPRD Kutim dengan tersangka Ahmad Sutrisno (AS), masih dilengkapi Slamet, Kanit Tipikor Polrest Kutim (Kaltimpos, 2014). Meskipun tak pasang target, namun polres kutim kini mulai disibukan dengan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya indikasi penyelewengan keuangan Negara. Bahkan jumlahnya ada tiga laporan masyarakat yang sudah diterima. Kapolres kutim AKBP Edgar Diponegoro mengatakan, beberapa dugaan penyelewengan dana Negara tersebut adalah dana bantuan sewa rumah mahasiswa kutim bernilai miliaran rupiah, termasuk proyek aspirasi DPRD Kutim dan pembebasan lahan Maloy.

Pihaknya tidak punya target, tapi saat ini anggota sedang mendalami tiga laporan masyarakat. Pertama adalah laporan terkait sewa rumah kos bagi anak mahasiswa kutim, ada juga proyek aspirasi dan pembebasan lahan. Khusus untuk sewa rumah, anggotanya sudah memanggil cukup banyak orang yang di anggap mengetahui sumber dana, dan penggunaan dana, untuk dimintai keterangan. Termasuk pejabat dan pengurus himpunan mahasiswa juga diperiksa. Untuk laporan ini, sudah cukup banyak yang kami panggil untuk dimintai keterangan. Bahkan dalam waktu dekat, laporan ini akan diekspos untuk diuji apakah memenuhi syarat untuk dinaikan kepenyidikan atau tidak. Tapi kasus ini masih penyelidikan. Sama dengan lainnya, semua masih dalam penyelidikan, “karna masih penyidikam, kami belum bisa simpulkan apakah memenuhi syarat untuk dinaikan kepenyidikan atau tidak. Yang jelas, pihaknya punya anggaran untuk menyidikan dua kasus. Itu minimal, bisa lebih kalau memang ada yang bisa disidik.

Meskipun masih dalam penyelidikan, namun mantan penyidikan KPK ini, mengisyaratkan tahun ini mampu menaikan kasus kepenyidikan sebanyak dua kasus. Hanya belum tentu dari kasus yang sedang digarap saat ini. Sekedar di ketahui, khusus untuk laporan dana hibah sewa rumah, pertama kali terungkap dari mahasiswa yang melakukan demo ke Kejari dan ke Polres Kutim beberapa bulan lalu. Konon, himpunan mahasiswa Kutai Timur (Hikma KT), mendapat anggaran rumah tahun lalu. Namun sewa rumah tersebut diduga tidak sampai pada sasaran. Bahkan banyak sewa rumah yang belum terbayar, sehingga mahasiswa penghuninya nyaris diusir pemilik rumah.

Namun demikian daerah juga berupaya bebas dari korupsi misalnya Pemerintah kota Samarinda mencanangkan 2014 Raih Opini WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) yaitu sejalan telah ditetapkannya Samarinda sebagai pilot project dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, di Balai Kota, Senin (Kaltimpost,13/1, 2013) dilakukan seminar upaya pencegahan korupsi yang diikuti oleh seluruh unsur pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yaitu di mulai staf ahli, asisten, kepala SKPD, kepala bagian, satuan tugas para camat dan seluruh se Samarinda. Tidak terkecuali Walikota Syaharie Jaang, wakil wali kota Nusyirwan Ismail, dan Sekkot Zulfakar Nor pun hadir pada acara ini.

Menurut Syaharie Jaang (Kaltimpost,2013) bahwa membantu tata-kelola pemerintahan yang baik tentulah menjadi dambaan setiap figur pemerintah guna

mendukung pelaksanaan perlu menyatukan pandangan sehingga tidak ada lagi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu ada komitmen bersama agar ke depan Samarinda bisa meraih opini WTP. Harapan tersebut akan dapat terwujud apabila seluruh SKPD sepakat selalu berpedoman pada aturan dan mekanisme administratif secara benar dalam pengelolaan keuangan.

Dalam seminar diiringi dengan penandatanganan komitmen pencanangan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sementara itu laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintahan kota Samarinda tahun 2012 telah diberitakan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Menurut Jaang adanya opini WTP ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota. Khususnya yang berkaitan dengan masalah korupsi. Oleh karena itu secara pribadi ia sangat mengapresiasi seminar ini agar bisa menjadi wahana informasi bagi semua jajaran dalam rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Sementara itu kasus tingkat nasional bahwa sidang akan dilakukan pada Februari maka Anas adalah pelanggar akan salah satu asas *Good Governance* yaitu akuntabilitas atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai anggota partai Demokrat yang menentukan kebijakan Negara karena partai Demokrat adalah Partai Pemenang Pemilu 2009. Beberapa perbuatan yang berbau korupsi adalah penerimaan uang dan harta benda yang illegal untuk Anas. Kesempatan untuk memenangkan perkara dipersidangkan sangat tipis. Akuntabilitas dapat dinilai dari apakah ia bekerja untuk negara di atas pribadi ataupun golongannya. Kalau dilihat dari keterlibatan Anas Urbaningrum yang sedemikian dahsyat yang menentukan langkahnya untuk kepentingan pribadinya maka dugaan korupsi yang dilakukan akan terbukti dipersidangan. Andaikata benar ia melakukan itu alangkah naifnya bagi tokoh sebesar Anas Urbaningrum. Kubu Anas Urbaningrum memang masih belum tahu pasti makna proyek-proyek lain yang dituduhkan oleh KPK. Hasil penelitian kepustakaan (Kaltimpost, Senin, 20 Januari 2014:5). Dari laporan M.Nazaruddin selama ini benar bearti setidaknya ada 20 (dua puluh) kasus lain terkait Anas Urbaningrum dan telah disampaikan ke KPK. Menurut pengacara M. Nazaruddin, Ela Syarief (2014) bahwa dari 20 (dua puluh) kasus lain tersebut 12 (dua belas) proyek kasusnya sudah dibuka dan di buat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) termasuk Proyek Besar Hambalang. Menurut pengacara kondang itu bahwa laporan kliennya bukan isapan jempol belaka sebab semua laporan disertai dengan bukti- bukti yang semuanya masih ada dan yang asli ditangan Anas Urbaningrum ditambah lagi kesaksian Yulianis mantan Wakil Direktur Keuangan PT. Permai Grup menyebutkan adanya aliran dana ke Anas Urbaningrum. Ungkapan kasus-kasus tersebut disampaikan di persidangan. Jadi ada harapan dengan ditahannya Anas Urbaningrum akan membuka tabir kasus tersebut lebih lebar sehingga uang yang dikorup akan kembali ke nagara. Di samping itu disampaikan oleh M. Nazaruddin pada pemeriksaan bulan Juli 2013. Dia justru yakin bahwa kasus itu benar adanya dan dia ikut dalam permainan kotor itu.

Menurut Nazaruddin yang ikut menikmati beberapa proyek, misalnya Proyek e-KTP misalnya, ada Setya Novanto dari Fraksi Golongan Karya mantan ketua Ketua Komisi 2, Anas juga ada di situ. Anas yang mengatur di DPR untuk proyek Hambalang”(Nazaruddin,2014:5)

Menurut Nazaruddin (Kaltimpost, 2014:5) Anas Urbaningrum memiliki 7 (tujuh) kantong usaha dengan nilai proyek Rp.64 trilyun. Di pihak KPK telah berkomitmen bahwa koruptor akan dituntut maksimal agar jera dan mencegah tipikor dan pihak pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya tidak menggubris laporan Nazaruddin. Di bawah ini daftar proyek Anas Urbaningrum versi Nazaruddin (Kaltimpost,2014:5) :

| Nama Proyek | Nilai |
|---|----------------|
| 1) Proyek e-KTP | Rp.5,9 triliun |
| 2) Proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60 | USD 200 juta |
| 3) Proyek gedung pajak..... | Rp.2,7 triliun |
| 4) Proyek PLTU Kaltim | Rp.2,3 triliun |
| 5) Proyek PLTU Riau..... | Rp.1,3 triliun |
| 6) Proyek Diklat MK | Rp.200 milyar |
| 7) Proyek Kilan 4 Cilacap | USD 930 juta |
| 8) Proyek pengadaan dan distribusi baju hansip di Kemendagri..... | Rp.560 milyar. |

IV. PENUTUP

Dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) ini peneliti mengambil kesimpulan dan saran yang peneliti dibawah ini :

A. Kesimpulan

1. Beberapa perbuatan yang berbau korupsi adalah penerimaan uang dan harta benda yang illegal untuk Anas.
2. Kesempatan untuk memenangkan perkara dipersidangan sangat tipis.
3. Akuntabilitas dapat dinilai dari apakah ia bekerja untuk negara di atas pribadi ataupun galongannya.
4. Kalau dilihat dari keterlibatan Anas Urbaningrum yang sedemikian dahsyat yang menentukan langkahnya untuk kepentingan pribadinya maka dugaan korupsi yang dilakukan akan terbukti dipersidangan.
5. Andaikata benar ia melakukan itu alangkah naifnya bagi tokoh sebesar Anas Urbaningrum.

B. Saran-saran

1. KPK harus menuntaskan siapa saja yang terlibat proyek Hambalang dan proyek lainnya.
2. Uang yang dikorupsi harus kembali ke Negara.
3. Lembaga Pengawasan Negara harus dilakukan dengan ketat.
4. Para pelaku koruptor harus dihukum seberat-beratnya.
5. Bila tak terbukti harus dikembalikan pada posisi semula dan dinyatakan bebas murni termasuk Anas Urbaningrum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson James E., 1984, *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Colebatch, H., 1993, *Market, Bureaucracy and Community*, Pluto, London.
- Dewey, John, 1953, *Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education*, The Macmillan Company, New York.
- Dimock and Dimock, 1969, *Public Administration*, Rinehart and Co., New York.
- Dunn, William, 1994, *Analisa Kebijakan*, Hanindita Offset, Yogyakarta
- , 1994, *Public Policy Analysis*, , NJ:Prantice Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Dye R. Thomas, 1972. *Politics, Economics, and Publics : Policy Outcomes in the Fifty state*, Rand-McNally, Chicago.
- , 1972, *Understanding Public Policy*, NJ:Prantice Hall, Englewood Cliffs.
- Easton, D., 1965, *A Framework for Political Analysis*, NJ: Prentice Hall. Englewood Cliffs.
- , 1953, *The Polical System*, Wiley, New York.
- , 1965, *A system Analysis of Political Life*, Wiley, New York
- , 1965, *A Framework for Political Analysis*, NJ:Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Edwards, C. George, 1976, *Implementing Public Policy*, Texas A dan M University Congressional Quartely Press, Washington.
- Ekowati, Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Suatu Kajian Teoritik dan Praktis*, Pustaka Cakra, Surakarta.
- Eulau, Heinz, and Kenneth Prewitt, 1973, *Labyrinths of Democracy*, Bobs – Merrill, Indiana Polis.
- Eyestone, Robert, 1971, *The Treads of Public Policy : A study in Policy Leadership*, Bobbs –Merrill, Indianapolis.
- Frederickson, H. G. and Smith, K. B., 2003, *The Public Administration Theory Primer*, Boulder, Col. : West View Prsess Frederick J. Carl, 1963, *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York.

Hornby, 1996, *Oxford University Press, London, England*

Surat Kabar

Surat Kabar Harian Kaltim Post, Senin tanggal 13 Januari 2014, Samarinda.